

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Salah satu keputusan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan. Setelah bertahun-tahun Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat maka bangsa Indonesia berjuang merebutnya. Dalam berjuang merebut kembali Irian Barat bangsa Indonesia menggunakan berbagai upaya, yakni melalui diplomasi maupun konfrontasi. Perjuangan melalui konfrontasi dilakukan dengan cara konfrontasi politik, ekonomi, sampai konfrontasi militer.

Pertama, sejak perundingan Diplomasi mengalami kegagalan hubungan Indonesia dan Belanda mengalami ketegangan. Walaupun demikian pemerintah Indonesia masih berupaya mencari penyelesaian politik lewat perundingan. Pada bulan September 1952, Indonesia juga mengirim nota politik kepada Belanda melalui Komisaris Agung RI Mr. Susanto Tirtoprojo, jawaban Belanda atas nota tersebut tidak akan melakukan perundingan dengan Indonesia yang membicarakan masalah kedaulatan atas Irian Barat. Belanda hanya akan bertemu tatap muka menghilangkan salah paham atau untuk menghilangkan kegelisahan pihak Indonesia, atau sekedar memberi penjelasan atas sikap Belanda yang sudah tidak dapat diubah-ubah itu. Reaksi atas sikap Belanda tersebut, timbul berbagai aksi spontan di kalangan rakyat Indonesia. bahkan ada sikap kesal terhadap sikap pemerintah Indonesia yang masih dianggap terlalu lemah dalam menyelesaikan persoalan Irian Barat. Sejak permulaan tahun 1952, hubungan Indonesia dan Belanda mengalami ketegangan, menghadapi persoalan tersebut Pemerintah Belanda melakukan mobilisasi para pemuda untuk mendaftarkan diri memasuki dinas militer untuk ditempatkan di Irian Barat. Tindakan itu mendapat reaksi oleh politisi Indonesia, baik di kalangan didalam parlementer maupun di luar parlementer, kalangan politisi mendesak pemerintah Indonesia agar membubarkan UNI, dan bersiap-siap untuk menjawab tindakan

Herlambang Ipang Sudrajat, 2015

OPERASI MANDALA DALAM RANGKA PEMBEBASAN IRIAN BARAT : PASANG SURUT HUBUNGAN INDONESIA - BELANDA 1961-1962

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Belanda dalam bidang militer dan serta memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda.

Kedua, Dalam konfrontasi militer diawali dengan dikeluarkannya TRIKORA (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961. Untuk melaksanakan Trikora dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Operasi pembebasan yang dilakukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ini melalui fase infiltrasi, fase eksploitasi, dan fase konsolidasi. Dengan adanya kesungguhan Indonesia dalam merebut Irian Barat mengundang simpati diplomat AS Ellsworth Bunker untuk mengusulkan rencana penyelesaian masalah Irian Barat. Indonesia menerima usul Bunker sedangkan Belanda menolaknya. Oleh karena itu Amerika Serikat mendesak Belanda untuk menerima Rencana Bunker. Atas desakan Amerika Serikat maka Belanda menerimanya dan menandatangani Persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Berdasarkan Persetujuan New York maka Irian Barat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 akan dilaksanakan serah terima Irian Barat dari tangan Belanda kepada Pemerintah Sementara PBB UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority).

Proses Integrasi Irian Barat atau Papua ke dalam NKRI mengalami tantangan yang cukup serius bahkan protes terhadap Integrasi Papua ke dalam NKRI semakin menguat kearah tuntutan pemisahan diri. Alasannya, rakyat Papua merasa tidak dilibatkan dalam proses-proses perundingan yang membahas masa depan wilayahnya. Ingatan suram pada masa lalu yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh instrumen kekuasaan pemerintah Indonesia dan militernya yang tidak menghargai cita-cita politik mereka, tanah adat, hak rakyat dirampas, sumber daya alam di eksplorasi dan dieksploitasi dan kemudian hasilnya diboyong ke luar negeri, martabat manusia direndahkan dan hak-hak asasi di injak-injak yang tampak dipermukaan sekarang sesungguhnya merupakan stigma masa lalu dan akumulasi dari sejumlah tuntutan dan aspirasi yang telah diperjuangkan sejak integrasi 1 mei 1963.

Ketiga, Dengan berhasilnya Irian Barat kembali kepada Indonesia dari tangan Belanda, hal ini tidak lepas dari peran penting Suharto sebagai Panglima Tertinggi Komando Mandala, yang pada waktu itu ditunjuk dan ditugaskan oleh Presiden

Sukarno untuk merebut Irian Barat dari tangan penjajah Belanda, Suharto hanya punya waktu tujuh bulan untuk merebut Irian Barat dan sasaran utama dari Komando Mandala adalah pada bulan Agustus 1962 bendera sang Merah Putih sudah harus berkibar di Irian Barat, tugas berat yang harus ditanggung Suharto jika melihat kondisi Indonesia pada waktu itu segala sesuatunya masih kekurangan. Sosok Suharto yang beakar dari desa adalah seorang pekerja keras dan pantang menyerah, pengalaman Suharto dalam militer sudah tidak diragukan lagi, mulai dari Suharto masuk menjadi perwira KNIL pada masa penjajahan kolonial Belanda. Lalu pernah menjadi seorang polisi pada masa penjajahan Jepang dan pada akhirnya dia bergabung dengan PETA. Suharto dewasa mempunyai sifat pendiam, patuh terhadap perintah, cerdik dan tidak berambisi dalam bidang Politik. Sosok Suharto inilah yang membuat ia ditunjuk oleh Presiden Sukarno untuk menjadi Panglima Komando Mandala.

Keempat, Selanjutnya sebagai wujud pelaksanaan Persetujuan New York maka diselenggarakanlah Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat (Pepera) pada tahun 1969. Hasil Pepera membuktikan secara bulat bahwa Irian Baralletap merupakan bagman dan Republik Indonesia. Hasil Pepera ini disetujui PBB pada tanggal 19 November 1969. Tindak lanjut perjanjian tersebut adalah pelaksanaan Act Of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, yang mana Pepera tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang menggunakan sistem *One Man One Vote* (satu orang satu suara) tetapi melalui sistem perwakilan yang melibatkan 1025 tokoh masyarakat Papua yang dipilih dan ditentukan oleh Indonesia dalam Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang mewakili 815.906 penduduk saat itu. Disinilah letak kecurigaan rakyat, telah terjadi manipulasi dan rekayasa aspirasi didalam pelaksanaan Pepera yang tidak sesuai dengan pasal 18 Perjanjian New York (one man one vote), sehingga legitimasi Pepera diragukan. Tak dapat dipungkiri bahwa perjuangan rakyat Papua ini telah menimbulkan polemik terbuka tentang urgensi mempertahankan sistem NKRI. Namun, polemik yang terjadi dan melibatkan sejumlah tokoh intelektual tidak mampu menyentuh bagian terdalam dari aspirasi dan tuntutan yang diperjuangkan rakyat Papua.

Kenyataan membuktikan bahwa lapisan terbesar dari rakyat Indonesia dan para pelaksana pemerintah negara ini cenderung memandang keinginan aspirasi dan

Herlambang Ipang Sudrajat, 2015

OPERASI MANDALA DALAM RANGKA PEMBEBASAN IRIAN BARAT : PASANG SURUT HUBUNGAN INDONESIA - BELANDA 1961-1962

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari RI hanya dalam perspektif politik yang sangat dangkal. Eksesnya, keinginan, aspirasi dan tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari RI hanya dilihat sebagai geakan separatis yang ingin memecah-bela integrasi bangsa. Penggunaan perspektif semacam itu sangat keliru dan bahkan menyesatkan, sebab kemudian yang terjadi adalah menyederhanakan persoalan yang sebenarnya justru sesuatu yang menjadi faktor pendorong untuk bersemangat memisahkan diri dari RI. Fakta membuktikan bahwa pembangunan Indonesia telah mencatat Irian (Papua) memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bangsa. Sumber daya alam yang dimilikinya (emas, minyak, tembaga, nikel, kayu dan sebagainya) dieksploitasi dan hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan nasional. Permasalahannya, apa yang diberikan negara kepada rakyat Papua setelah Papua memberikan sumbangan hak miliknya untuk Negara dan seluruh rakyat Indonesia ?Kenyataan menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu rakyat Papua tetap hidup dalam kemiskinan, kemelaratn dan keterbelakangan. Strategi pembangunan nasional ternyata tidak mampu menjadikan rakyat Papua sebagai kelompok sosial yang harus ikut dibangun kemampuan ekonomi dan intelektualnya namun Justru sebaliknya.

5.2. REKOMENDASI

Penelitian ini diharapkan mampu dipergunakan atau dimanfaatkan oleh berbagai kalangan terutama oleh lembaga perguruan tinggi, khususnya departemen pendidikan sejarah fakultas pendidikan ilmu pendidikan sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan sumber penelitian atau bacaan mengenai demokrasi terpimpin, hubungan politik luar negeri Indonesia khususnya mengenai permasalahan Irian Barat. Lembaga sekolah khususnya dijenjang kelas XIV sekolah menengah atas (SMA) penelitian ini dapat dipergunakan untuk memperkaya materi pembelajaran sejarah, yang tertuang dalam KD 3.4 mengenai evaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa indonesia pada masa demokrasi terpimpin serta KD 4.4 melakukan penelitian sederhana tentang

kehidupan politik, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin serta menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.

Bagi para pembaca lainnya diharapkan dapat mengambil hikmah dari penelitian ini serta mencontoh sifat-sifat positif dari peristiwa serta para tokoh yang terlibat didalamnya. Hikmah yang dapat penulis berikan ialah sifat kerja keras, cinta tanah air, dan tidak cepat putus asa yang diperlihatkan oleh pemerintah Indonesia telah membuahkan hasil yang maksimal, dengan kembalinya Irian Barat ke NKRI. Dengan waktu kurang lebih tujuh bulan dengan didorong rasa cinta tanah air dan semangat juang yang tinggi, dengan kecerdiakan para tokoh bangsa walaupun alusista Indonesia pada saat itu tidak memadai tetapi Bangsa Indonesia berhasil memukul mundur Pasukan Belanda dari wilayah Irian Barat.

Selain itu melalui penelitian ini, peneliti juga merekomendasikan penelitian selanjutnya yang belum dijelaskan maupun yang belum dibahas secara rinci dalam penelitian ini. Yaitu mengenai:

1. Intervensi Amerika Serikat terhadap Irian Barat

Bagi penulis kenapa merekomendasikan Intervensi Amerika Serikat terhadap Irian Barat. Amerika Serikat mengutus seorang diplomat Ellsworth Bunker untuk menyelesaikan masalah sengketa Irian Barat melalui jalan perdamaian usul ini terkenal dengan sebutan Usul Bunker. Hal ini sesuai dengan sikap Amerika Serikat yang semula-mula cenderung membantu Belanda, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya Indonesia mendapat bantuan ekonomi dan perlengkapan militer dari Uni Soviet untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Disamping itu diperkirakan kekuatan Belanda di Irian Barat akan mampu untuk melawan Indonesia. Maka pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York diadakanlah perundingan antara Indonesia dan Belanda, perundingan tersebut kini dikenal dengan sebutan persetujuan New York dimana rakyat Irian Barat diberi kebebasan memilih hak untuk masuk kedalam pemerintahan Belanda atau Indonesia.

2. Mengenai Gerakan Disintegrasi Di Papua Yang Terjadi Di Indonesia (OPM)

Herlambang Ipang Sudrajat, 2015

OPERASI MANDALA DALAM RANGKA PEMBEBASAN IRIAN BARAT : PASANG SURUT HUBUNGAN INDONESIA - BELANDA 1961-1962

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Organisasi Papua Merdeka berdiri pada tahun 1965, dua tahun setelah Irian Barat resmi masuk kedalam wilayah NKRI, gerakan ini didasarkan atas rasa tidak setuju atau tidak puas dengan masuknya Irian Barat kedalam wilayah Indonesia. Gerakan ini disebut separatis karena berusaha memisahkan kembali wilayah Papua dari NKRI. Penulis merekomendasikan perlu adanya penelitian mengenai peristiwa ini agar ada titik terang.

3. Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan Irian Barat perlu melakukan penelitian yang lebih dalam lagi terutama mengenai pihak-pihak yang berusaha mendukung kedua negara tersebut dan negara-negara yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kedua negara tersebut. Dalam penelitian ini penulis hanya menyebutkan sekilas tidak terlalu mendetail dalam mengungkap permasalahan pasang surut hubungan bilateral Indonesia dan Belanda.